

November 2011

## Kemiskinan Melonjak, Jurang Kesenjangan Melebar

Kekayaan 40 orang terkaya, setara kekayaan 60 juta penduduk

### Poin Penting:

- Kemiskinan justru bertambah pada tiga tahun terakhir, Indonesia adalah negara terburuk di Asia Tenggara dalam memerangi kemiskinan
- Jurang kesenjangan juga makin melebar, konsentrasi kekayaan dan ekonomi kini makin terpusat pada beberapa orang saja
- Keadilan sosial-ekonomi harus dimasukkan dalam target pembangunan untuk mencegah ledakan sosial dan menjaga pembangunan terus berkelanjutan

Penanggungjawab Pelaksana:

**Setyo Budiantoro, MA**

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarasa

### Panel Ahli dan Research Associate:

- Prof. Dr. Sri-Edi Swasono
- Prof. Dr. Hasbullah Tabrani
- Prof. Dr. A. Erani Yustika
- Dr. Bambang Ismawan (c)
- Dr. B. Herry Priyono
- Dr. Edi Suharto
- Dr. A. Prasetyantoko
- Dr. Poppy Ismalina
- Dr. Zulfan Tadjoeddin
- Dr. Muliadi Widjaja
- Dr. Sutoro Eko (c)
- Dr. Ari Sujito (c)
- Dr. Berly Martawardaya (c)

PRAKARSA *Policy Review* adalah analisis dan rekomendasi kebijakan independen tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.

Indonesia adalah negara terburuk di Asia Tenggara dalam menanggulangi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Indonesia dikalkulasi justru bertambah 2,7 juta orang selama tiga tahun terakhir. Dan lebih memalukan lagi, penambahan kemiskinan ekstrem ini adalah satu-satunya pengecualian negara di Asia Tenggara. Jangankan dibandingkan dengan Thailand atau Malaysia, Indonesia bahkan tertinggal dari Kamboja dan Laos dalam mengurangi kemiskinan.

Disamping kemiskinan bertambah, Indonesia celakanya juga makin senjang. Akumulasi kekayaan 0,02% penduduk terkaya kini setara dengan 25% Produk Domestik Bruto (PDB). Kekayaan yang dimiliki 43 ribu orang itu, hampir sama dengan akumulasi kekayaan 140 juta orang atau 60% penduduk. Bila kondisi ini dibiarkan terus terjadi, ledakan sosial bisa terjadi sewaktu-waktu akibat rasa keadilan sosial-ekonomi yang terkoyak.

### Politik Angka Kemiskinan

Pemerintah Indonesia menetapkan garis kemiskinan sedikit di bawah Bank Pembangunan Asia (ADB). Tahun lalu, garis kemiskinan ditetapkan Rp 212 ribu per bulan atau Rp 7.060/hari (BPS, 1 Juli 2011). Jumlah itu setara dengan US\$ 1,13 PPP.<sup>1</sup> Sementara, ADB menggunakan US\$ 1,25 PPP (atau 7.800 rupiah per hari) untuk menentukan garis kemiskinan.<sup>2</sup> Selisih sekitar 10% atau 12 sen dollar AS (tak sampai 750 rupiah) tersebut ternyata membuat perbedaan yang luar biasa.

Jumlah orang miskin di Indonesia dikalkulasi melonjak lebih dari 12 juta orang atau meningkat sekitar 40% menjadi 43,1 juta orang. Padahal, kemiskinan dengan ukuran tersebut sebenarnya sudah ditinggalkan karena dinilai tidak manusiawi. Jumlah itu hanyalah setara dengan ongkos sekali masuk tol atau parkir di pusat perbelanjaan modern, padahal dengan jumlah tersebut keluarga miskin harus mencukupi pengeluaran untuk lebih dari seratus jenis komoditi meliputi makanan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Indonesia secara menyedihkan menjadi satu-satunya pengecualian diantara negara-negara Asia Tenggara, dimana tingkat kemiskinannya justru bertambah selama tiga tahun terakhir (lihat tabel 1).

Banyak negara kini telah menggunakan US\$ 2 PPP yang setara dengan sekitar Rp 12 ribu sebagai batas kemiskinan. Ukuran itu, sebenarnya hanya menaikkan sekitar 5.000 rupiah dari angka garis kemiskinan nasional.



Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Malaysia dan Thailand bahkan telah membuat batasan yang lebih tinggi lagi.<sup>3</sup>

Apabila ukuran kemiskinan US\$ 2 PPP digunakan di Indonesia, setidaknya ada 117 juta orang atau lebih dari separuh (51%) penduduk tergolong miskin! Dengan ukuran itu, jumlah orang miskin bertambah 15,5 juta orang atau hampir 6% dalam tiga tahun terakhir. Garis kemiskinan yang dinaikkan tak sampai 60%, mengakibatkan angka kemiskinan mencapai hampir empat kali lipat dibandingkan angka kemiskinan resmi pemerintah (lihat grafik).

Oleh karena itu, tak mengherankan jika ukuran kemiskinan di Indonesia menjadi sangat politis. Penurunan angka kemiskinan bagaimanapun juga menjadi ukuran prestasi pemerintah berjalan. Wajar saja apabila standar kemiskinan dibuat minimal (konservatif) karena kalau dinaikkan sedikit saja, maka angka kemiskinan akan melonjak tinggi. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan hasil “rapor merah” pembangunan. Itulah sebabnya, “politik angka kemiskinan” untuk pencitraan kinerja pemerintah sangatlah rentan terjadi. Dalam konteks ini, BPS sebagai lembaga bentukan pemerintah menjadi rentan untuk dijadikan alat politik pemerintah dalam isu pengurangan kemiskinan.

“Politik angka kemiskinan” ini sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Pengkategorian jutaan orang yang sebenarnya miskin, namun karena kriteria kemiskinan terlalu rendah, membuat orang-orang miskin ini terampas haknya dari bantuan negara karena pemerintah menganggap mereka tidak miskin. Jika ini dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan angka kemiskinan yang rendah, maka pemerintah sebenarnya telah abai terhadap kewajiban konstitusi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

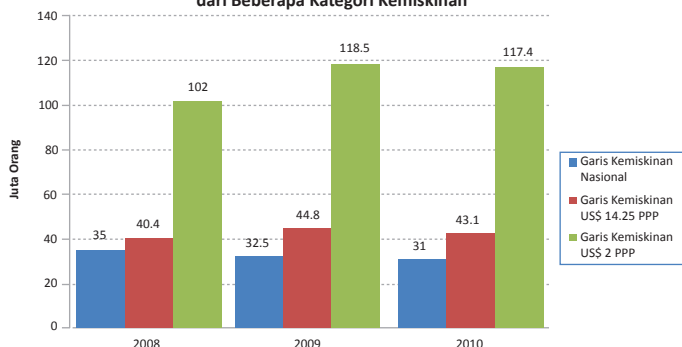
Tabel.1

Jumlah Penduduk Miskin di Negara Asia Tenggara (dalam Juta)  
Ukuran Kemiskinan di Bawah US\$ 1.25 PPP

| Tahun | Indonesia | Philipina | Vietnam | Kamboja | Laos | Thailand | Malaysia |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|----------|----------|
| 2008  | 40,4      | 15,85     | 11,97   | 4,1     | 2,18 | 0,14     | 0,00     |
| 2009  | 44,8      | 16,29     | 11,62   | 4,2     | 2,12 | 0,16     | 0,00     |
| 2010  | 43,1      | 15,63     | 11,1    | 4,09    | 2,04 | 0,11     | 0,00     |

Sumber : Asian Development Bank (ADB), 2011

Jumlah Penduduk Miskin  
dari Beberapa Kategori Kemiskinan



Sumber: BPS, 2011 dan ADB, 2011 (diolah)

Keterangan:

1. Garis kemiskinan nasional tahun 2010 adalah Rp 7.060
2. Garis Kemiskinan US\$ 1.25 PPP tahun 2010 setara Rp 7.800
3. Garis kemiskinan US\$ 2 PPP tahun 2010 setara Rp 12.474

## Jurang Kesenjangan Makin Melebar

Parahnya lagi, disamping kemiskinan yang makin tinggi kesenjangan pun turut melebar ekstrem. Penguasaan kue ekonomi kini makin terkonsentrasi pada kelompok super kaya yang jumlahnya sangat kecil. Pada tahun 2010 kekayaan 40 orang terkaya sebesar Rp 680 triliun (US\$ 71,3 miliar) atau setara dengan 10,3% PDB Indonesia.

Jumlah kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan sekitar 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin. Catatan dari Majalah Forbes menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia naik rata-rata sekitar 80% tiap tahun. Persentase akumulasi kekayaan beberapa orang terkaya tersebut terhadap PDB di Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan negara-negara seperti Amerika, Jerman, China dan Jepang (lihat tabel 2).

Bila dilihat lebih jauh lagi, ternyata hanya 0,02% penduduk terkaya akumulasi kekayaannya setara dengan 25% PDB (Winters, 2011).<sup>4</sup> Kekayaan yang dimiliki oleh 43 ribu orang terkaya itu, hampir setara dengan akumulasi kepemilikan 60% penduduk atau 140 juta orang. Situasi ini bisa jadi lebih buruk dibandingkan kondisi menjelang kejatuhan Orde Baru (1997), dimana kekayaan 1% penduduk setara dengan kekayaan 28% penduduk.<sup>5</sup> Konsentrasi kekayaan Indonesia kini dibandingkan negara tetangga lain adalah 3 kali lebih tinggi dari Thailand, 4 kali dibanding Malaysia, serta 25 kali dibandingkan Singapura (Winters, 2011).

Indikasi kesenjangan juga bisa dilihat dari kepemilikan simpanan pihak ketiga di bank. Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (Juli, 2011), jumlah dana pihak ketiga perbankan

mencapai Rp 2.400 triliun yang disimpan hampir 100 juta rekening nasabah, namun 40% dari jumlah itu (Rp 1.000 triliun) hanya dikuasai oleh 0,04% nasabah atau 40 ribu rekening. Lebih jauh lagi, hanya 1,3% rekening menguasai 75% dana pihak ketiga (Rp 2.000 triliun).

Berbagai fakta tersebut menunjukkan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan. Lalu, bagaimana indikator Gini (pengukur kesenjangan) yang dikeluarkan BPS bahwa kondisi ekonomi Indonesia relatif merata dengan indeks Gini hanya 0,33.<sup>6</sup> Sudah terlalu banyak kritik terhadap pengukuran BPS yang dianggap terlalu rendah dari kenyataan (*underrepresented*), salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan sensus ekonomi memotret keluarga kaya, apalagi super kaya. Hal ini menyebabkan kesenjangan tidak terlalu terlihat.

Secara ekonomi politik, persoalan kesenjangan seringkali secara sengaja ditutupi oleh negara atau lembaga-lembaga keuangan internasional konservatif. Mengutak-utik kesenjangan artinya mempertanyakan struktur ekonomi yang tidak berkeadilan, sehingga menuntut perubahan dan perombakan sistem pembangunan. Hal ini tentu saja dihindari oleh para pendukung status quo yang selalu diuntungkan dengan sistem yang ada. Oleh karena itu, seringkali secara sengaja isu kemiskinan lebih ditonjolkan untuk menutupi isu kesenjangan.

Padahal apa yang terjadi bukanlah “semua tumbuh, namun yang kaya lebih cepat”, seperti diklaim selama ini. Namun yang terjadi adalah, “yang kaya meningkat cepat, tetapi yang miskin makin melarat”. Atau dalam bahasa yang populer “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” adalah potret yang lebih tepat.<sup>7</sup> Dan sayangnya, sistem seperti ini terus terpelihara dengan baik hingga sekarang.

## Kepemilikan Lahan Makin Terkonsentrasi

Terjadinya “redistribusi kekayaan pada orang super kaya dan pemiskinan pada orang miskin” sebenarnya terjadi secara sistematis. Hal yang kasat mata terlihat adalah dengan mencermati kepemilikan aset produksi berupa lahan tanah. Aset produksi berupa lahan merupakan hal fundamental karena hampir 40% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan kemiskinan sebagian besar di pedesaan (BPS, 2010).

Tidak terjadinya reformasi agraria menyebabkan ketimpangan kepemilikan lahan pertanian yang sangat buruk.<sup>8</sup> Bila tahun 1983 indeks Gini kepemilikan tanah adalah 0,50, maka pada tahun 2003 indeks Gini telah mencapai 0,72. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan kesenjangan kepemilikan yang sangat tinggi, namun juga memperlihatkan konsentrasi kepemilikan lahan. Tren kepemilikan ratusan ribu hektar lahan pertanian perkebunan yang dimiliki para pengusaha kaya memperlihatkan fenomena itu.

Di sisi lain, kini makin banyak dijumpai rata-rata kepemilikan tanah yang dimiliki petani hanyalah 0,3 hektar atau hanya menjadi buruh tani tak berlahan (*landless*). Seandainya lahan tersebut ditanami padi, maka pendapatan yang diterima hanyalah Rp 220 ribu/bulan.<sup>9</sup> Tak mengherankan bila ditemukan bahwa 80 persen pendapatan petani kecil bukan dari pertanian (*non-farm*), namun dari ojek, kuli bangunan, pedagang kaki lima, dll.<sup>10</sup>

Situasi ini memperlihatkan kebalikan yang ekstrem. Pada petani kecil lahan makin merosot seiring kemiskinannya, sebaliknya pada pengusaha kaya kepemilikan lahan raksasa makin jamak dijumpai seiring melambungannya harga komoditas di pasar dunia. Kelapa sawit misalnya, adalah salah satu andalan penyebab melejitnya kekayaan para pengusaha terkaya Indonesia.

### Urbanisasi *Push Factor* dan Sektor Informal

Akibat pertanian dan desa tidak bisa diandalkan untuk penghidupan, maka penduduk desa mencari mata pencaharian dengan melakukan urbanisasi (atau menjadi TKI). Migrasi jenis ini adalah akibat *push factor* yaitu didorong akibat kesulitan sumber penghidupan layak di desa. Migrasi ini berbeda halnya dengan *pull factor*, dimana aktivitas ekonomi kota tumbuh pesat sehingga “menarik” tenaga kerja desa karena ada kesempatan.

Tingkat urbanisasi Indonesia sangat mengkhawatirkan, bahkan telah melampaui negara berkembang raksasa seperti China dan India.<sup>11</sup> Urbanisasi akibat terdesak kesulitan hidup adalah urbanisasi tanpa pendidikan ataupun keterampilan memadai. Di sisi lain, disamping tidak sesuai kebutuhan tenaga kerja akibat levelnya yang rendah, kota juga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja baru. Akibatnya, sektor informal di kota-kota besar menjamur seperti cendawan di musim hujan dan menjadi gantungan hidup banyak orang.

Kondisi ini diperparah pula oleh kualitas pertumbuhan ekonomi yang makin sedikit menyerap tenaga kerja. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang terdidik pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Sektor informal akhirnya menjadi lahan yang penuh sesak dan menjadi sandaran hidup untuk memperebutkan remah-remah kue ekonomi.

Tenaga kerja terdidik yang bekerja di sektor informal sebenarnya melakukan “bunuh diri kelas” yaitu bekerja pada sektor yang lebih rendah dari tingkat pendidikan atau ketrampilannya. Tindakan “bunuh diri kelas” sebenarnya adalah pemborosan produktivitas sumber daya manusia (SDM) terdidik. Namun apa daya, ini terjadi karena tidak ada pilihan lain.

### Eksklusi Akses Finansial

Gagalnya sektor formal untuk menampung tenaga kerja menjadikan sektor informal sebagai penghidupan utama sebagian besar orang. Sebagian besar bekerja di sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Tahun 2008, tercatat 51 juta entitas UMK yang menyerap 88 juta pekerja atau 94% total tenaga kerja (BPS dan Kementerian Koperasi-UKM, 2009). Peran mereka dalam perekonomian tidak bisa dikatakan kecil. Kegiatan ekonomi yang mereka usahakan menyumbang lebih dari 42% PDB Indonesia.

Masalahnya, hambatan untuk mengembangkan atau memperluas usaha bagi UMK justru sangat besar. Akses untuk memperoleh modal menjadi kesulitan utama mereka, disusul sulitnya akses pasar dan kurangnya kapasitas atau keahlian. Permodalan selalu menjadi “hantu” menakutkan bagi banyak UMK. Hingga kini, mayoritas modal diperoleh dengan mengurus aset sendiri (84%) atau melalui jalur informal seperti teman, rentenir dan pemberi modal di luar kerabat yang sifatnya perorangan.

tabel. 2  
Persentasi Akumulasi Kekayaan Orang Terkaya terhadap PDB di Beberapa Negara

| Negara    | Jumlah Orang Terkaya | % Kekayaan terhadap PDB 2010 |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| Indonesia | 40                   | 10,3%                        |
| Amerika   | 400                  | 9,4                          |
| Jerman    | 52                   | 7,4                          |
| Brasil    | 30                   | 6,3                          |
| Inggris   | 32                   | 4,2                          |
| China     | 115                  | 3,9                          |
| Jepang    | 26                   | 1,4                          |

Sumber : New York Times (Juli, 2011) dan Forbes (Desember, 2010)

Ironisnya, ada sekitar Rp 500 triliun masih tersimpan di perbankan per tahun, yang seharusnya bisa disalurkan untuk mereka. Perbankan masih menyukai cara paling aman untuk memperoleh keuntungan. Dana masyarakat yang mereka kelola disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kalau dengan cara yang tanpa risiko ini saja mereka bisa memperoleh keuntungan bersih hingga triliunan rupiah, untuk apa lagi menyalurkan kredit bagi UMK?

### Keadilan, Kesenjangan dan Kemiskinan

Masalah distribusi atau keadilan ekonomi adalah problem krusial di Indonesia. Kesenjangan atau kekayaan yang terkonsentrasi bukan hanya menyinggung rasa keadilan, namun juga menyebabkan ekonomi rentan dan rapuh. Daya beli tinggi, namun hanya dimiliki segelintir orang akan membuat agregat permintaan (*demand*) yang terbatas. Disamping itu, tidak mungkin semua pendapatan yang didapatkan orang-orang terkaya akan dibelanjakan.

Di sisi lain, rendahnya daya beli akibat kemiskinan yang secara luas dialami masyarakat juga membuat permintaan barang dan jasa yang terbatas. Kelas menengah di Indonesia, disamping jumlahnya masih kecil, mayoritas adalah kelas menengah bawah sehingga juga masih terlalu lemah untuk menjadi poros penggerak ekonomi.

Lemahnya akses atau pengucilan (eksklusi) sosial ekonomi menyebabkan masyarakat kelas bawah sulit untuk berkembang. Penguatan ekonomi rakyat tanpa memperbaiki akses pada aset-aset produksi tidak akan membuat ekonomi beranjak terlalu jauh. Akses yang terbuka, sebenarnya akan menyebabkan mereka akan berkembang dan menyelesaikan persoalannya sendiri. Pengucilan akses, justru akan menyebabkan ketergantungan pada bantuan dan kesulitan untuk berkembang. Inilah juga yang menyebabkan kesenjangan terus melebar.

Hal yang sangat mengkhawatirkan bila ketidakadilan sosial-ekonomi terus terjadi adalah guncangan sosial-politik. Hal ini sangat menakutkan karena kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir kecil orang akan begitu mudah mereka pindahkan. Inilah yang menyebabkan kekeringan likuiditas seperti yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1998.



**Perkumpulan Prakarsa**

Jl. Rawa Bumbu I Blok. A No.8-E  
RT 010 RW 06  
Kel/Kec. Pasar Minggu - Jakarta  
Selatan 12520 Indonesia  
Ph. +62-21-7811-798  
Fax. +62-21-7811-897  
Email: perkumpulan@theprakarsa.org

**Perkumpulan Prakarsa** adalah institusi independen yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.

**Tim Pendukung:**

Victoria Fanggidae,  
Ah Maftuchan, B. Chelvi  
Yuliasuti, Diza Permatasari,  
J. Prastowo

Pembaca dipersilahkan mengutip atau mereproduksi **Prakarsa Policy Review** dengan menyebutkan sumber aslinya, asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

Bila Anda ingin berlangganan melalui email atau cetak, silahkan hubungi :  
[policyreview@theprakarsa.org](mailto:policyreview@theprakarsa.org)

Akibatnya, hasil pembangunan yang dilakukan bertahun-tahun akan rontok dalam sekejap.

**Rekomendasi Kebijakan**

Kemiskinan melonjak dan jurang kesenjangan yang melebar adalah hal prioritas yang perlu ditangani, sebelum terlambat dan menjadi ledakan sosial yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu segera dilakukan, yaitu :

**1. Mengadopsi garis kemiskinan yang mengukur keadilan ekonomi**

Indonesia perlu mengadopsi garis kemiskinan dengan indikator di bawah 60 persen dari rata-rata pengeluaran/pendapatan dalam lingkungannya (bisa kabupaten, kota, propinsi atau nasional). Dengan memeriksa seberapa banyak orang tertinggal dibandingkan yang lain, ukuran kemiskinan ini sekaligus mampu mengukur tingkat ketimpangan dan memeriksa eksklusi sosial. Indikator ini juga membantu rekomendasi lebih lanjut untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki keadilan ekonomi. Problem terbesar Indonesia bukanlah kekurangan, namun lebih pada distribusi tidak merata.

Secara rata-rata nasional, ukuran garis kemiskinan ini berarti sekitar Rp 15.000 per hari. Akan tetapi, garis kemiskinan ini bisa berbeda dengan daerah satu dengan yang lain karena biaya hidup dan lingkungan yang relatif berbeda. Ukuran garis kemiskinan seragam dan terlalu rendah seperti yang selama ini ada, disamping tak manusiawi juga tidak realistis. Biaya hidup di kota besar, misalnya Jakarta, jelas tak bisa disamaratakan dengan pedalaman Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera atau Jawa.

**2. Mengurangi kesenjangan menjadi target pembangunan**

Pemerintah perlu memasukkan target, strategi dan cara pengurangan kesenjangan agar menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dalam UU APBN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Dan hal ini, sama sekali tidak pernah

dicantumkan dalam dokumen resmi negara. Padahal, tidak ada gunanya pembangunan apabila hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk.

Kesenjangan yang tinggi adalah bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan sosial dan justru akan menghancurkan hasil pembangunan bertahun-tahun secara sia-sia. Pengukuran kesenjangan juga perlu diperbaiki agar lebih mampu menunjukkan realitas, terutama akurasi dalam mendata orang-orang kaya dan super kaya.

**3. Menjaga independensi BPS**

Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini di bawah kontrol pemerintah, sebab Kepala BPS dipilih dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Pemerintah tentu wajar berkepentingan agar angka-angka keberhasilan pembangunan terlihat bagus (termasuk angka kemiskinan). BPS dalam hal ini pada posisi lemah dengan tekanan pemerintah sehingga angka-angka rawan untuk "dimasak". Bila ini terjadi, tentu akibatnya fatal karena hampir semua perencanaan pembangunan mendasarkan data dari BPS. Untuk menjaga independensi dari pemerintah, maka pemilihan Kepala BPS perlu berdasarkan usulan tiga nama dari Presiden dan dipilih oleh DPR. Contoh negara lain yang tidak kompromi dan secara ketat mengatur agar Badan Statistik independen dan tidak di bawah kontrol pemerintah adalah Inggris.

Disamping itu, perlu dibentuk Komisi Pengawas BPS yang paling tidak terdiri dari: ahli statistik independen (universitas), masyarakat sipil, organisasi bisnis, DPR dan pemerintah. Komisi Pengawas adalah semacam *steering committee* atau komisisaris independen yang bertugas mengarahkan dan mengawasi BPS. Lalu, BPS juga perlu masuk menjadi anggota *The Luxembourg Income Study* (LIS) agar memperoleh *review* dan peningkatan kapasitas teknis sehingga keluaran data makin akurat untuk acuan pembangunan.

**Ditulis oleh Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa (sbudiantoro@theprakarsa.org) dan Luhur Fajar Martha, Research Associate Perkumpulan Prakarsa (luhurfm@yahoo.com).**

**Endnotes**

<sup>1</sup>Nilai satu *dolar purchasing power parity* (PPP) atau US\$ 1 PPP, tidaklah sama dengan nilai satu dolar nominal atau kurs mata uang (US\$ 1). US\$ 1 PPP adalah konversi nilai kesetaraan barang/jasa yang bisa dibeli di suatu negara dengan US\$ 1 di Amerika. Di Indonesia nilai US\$ 1 PPP adalah setara dengan nilai uang sebesar Rp 6.237,- <http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP>

<sup>2</sup>Wan, Guanghua and Iva Sebastian, *Poverty in Asia and the Pacific: An Update*, Asian Development Bank, August 2011

<sup>3</sup>Asian Development Bank, *The World's Bank New Poverty Data: Implications for the Asian Development Bank*, 2008

<sup>4</sup>Winters, A Jeffrey, *Ancaman Oligarki dan Masa Depan Politik Indonesia*, bahan presentasi 2011

<sup>5</sup>Davies, B. James (Ed), *Personal Wealth From a Global Perspective*, Oxford University Press, 2008

<sup>6</sup>Indeks gini digunakan untuk mengukur kesenjangan dengan skala 0 sampai 1, semakin besar nilainya menunjukkan kesenjangan makin besar. Indeks di atas 0,4 secara umum disepakati menunjukkan kesenjangan yang mengkhawatirkan.

<sup>7</sup>Istilah "Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin" dipopulerkan dari lagu dangdut yang dinyanyikan Rhoma Irama tahun 1980-an

<sup>8</sup>Reformasi agraria adalah salah satu kunci keberhasilan ekonomi negara-negara Asia, antara lain Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dll. Stiglitz bahkan telah menyarankan adanya *land reform* dalam wawancara di Tempo tahun 2007

<sup>9</sup><http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/03/30/kemiskinan-petani-faktor-lahan/>

<sup>10</sup><http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/03/opini/600419.htm>, joseph stiglisz "pemenang nobel ekonomi"

<sup>11</sup>Misra, Satish, *Economic Inequality in Indonesia: Trends, Causes and Policy Response*, Strategic Asia, 2009